

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Feminisme adalah sebuah paradigma dan pemahaman komprehensif mengenai keadilan berbasis gender yang bisa menjadi pijakan untuk pemikiran, gerakan, ataupun kebijakan (Melati, 2019, p. 9). Feminisme adalah pendekatan bidang studi untuk isu kesetaraan dan isu keadilan, ditinjau dari segi jenis kelamin, kelas sosial, ras, suku, agama, dan gender.

Sedangkan secara etimologis, feminisme berasal dari kata *femme* berarti perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak), sebagai kelas sosial (Ratna, 2013, p. 184). Feminisme adalah sebuah kata yang memayungi berbagai pendekatan, pandangan, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan penindasan terhadap perempuan dan jalan keluar yang digunakan untuk menghapuskan penindasan tersebut (Tong, 2009, p. 1). Apabila ditinjau dari pengertian di atas, sebenarnya feminisme bukan hanya memperjuangkan kesetaraan perempuan di hadapan lelaki saja, tetapi memperjuangkan lelaki dari dominasi, eksploitasi, dan sistem yang tidak adil.

Gerakan feminisme dibagi menjadi tiga gelombang. Pelabelan gelombang yang digunakan semata-mata sebagai alat bantu agar lebih mudah dipahami, tidak dijadikan patokan apalagi sebagai identitas tersendiri (Ratna, 2013, p.

12). Meskipun berbeda golongan, tujuan gerakannya tetap sama. Dan di setiap gelombangnya terdapat beberapa aliran feminisme.

Feminisme gelombang pertama dimulai sejak adanya tulisan milik Mary Wollstonecraft yang berjudul “*The Vindication of The Rights of Woman* (1792)” hingga perempuan yang mencapai hak pilih pada awal abad ke-20. Gerakan ini hanya memperjuangkan perempuan lajang dari kelas menengah dan yang memiliki intelektualitas tinggi. Fokus gerakannya juga hanya kepada isu-isu tertentu, belum ada kesadaran yang lebih luas mengenai gerakan feminisme (Suwastini, 2013, p. 200). Aliran feminisme gelombang ini terdiri dari feminisme liberal, feminisme Marxis dan sosialis, serta feminisme radikal.

Feminisme gelombang kedua dimulai sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya buku milik Betty Freidan dengan judul “*The Feminine Mystique*” tahun 1963, diikuti dengan berdirinya *National Organization for Woman* pada tahun 1966, dan munculnya kelompok-kelompok *Consciousness Raising* (CR) akhir pada tahun 1960an. Gelombang ini muncul akibat adanya ketidakpuasan atas perlakuan terhadap perempuan yang mengalami diskriminasi meskipun sudah mendapat emansipasi secara hukum dan politis dari perjuangan feminisme gelombang pertama (Suwastini, 2013, p. 201). Aliran feminisme gelombang ini terdiri dari feminisme eksistensialis dan feminisme psikoanalisis.

Feminisme gelombang ketiga muncul berbarengan dengan negara-negara di Asia-Afrika yang merdeka. Kini sejarah feminisme tidak hanya dari Eropa saja, tapi ada andil dari perempuan di negara lainnya (Melati, 2019, p. 18). Ada tiga hal yang mendasari lahirnya feminisme gelombang ketiga, seperti konsep perjuangan feminisme yang bersifat rasis atau hanya memperjuangkan perempuan kulit putih kelas menengah, feminisme gelombang kedua belum cukup mampu menyuarakan isu “*sexual difference*”, serta adanya perkembangan teori-teori postmodernisme, poststrukturalisme, dan postkolonialisme (Brooks, 1997, p. 8). Aliran feminisme gelombang ketiga adalah feminisme postmodern, feminisme multikultural, dan ekofeminisme.

Gerakan feminisme di Indonesia lahir sejak awal abad ke-20. Munculnya gerakan feminisme di Indonesia dipengaruhi oleh; (1) kondisi sejarah perjuangan bangsa, (2) kondisi religiusitas dan adat istiadat masyarakat Indonesia, (3) adanya program pembangunan nasional, (4) globalisasi dan reformasi (Sonia, 1996).

Di Indonesia sendiri sampai saat ini masih banyak perdebatan mengenai gerakan feminisme yang dikatakan berbeda dengan gerakan perempuan. Masih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang belum setuju jika gerakannya dilabeli dengan gerakan feminisme. Padahal kata tersebut boleh untuk digunakan dalam gerakan perempuan. Karena pemahaman feminisme secara mendasar yaitu sebagai analisis masalah perempuan dan bertindak untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan (Arivia & Subono, 2018, p. 6).

Patut diakui jika feminisme dan kesadaran bangsa-bangsa adalah hasil dari abad pencerahan di Eropa dan menemukan jalannya melalui politik etis yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Interaksi Kartini dengan seorang feminis sosialis bernama Stella Zeehandelaar dan surat-suratnya menjadi buku wajib para *founding father and mother* karena kesadaran “keperempuanan” yang berasaskan kemanusiaan menjadi pencetus awal dari munculnya kesadaran kebangsaan (Melati, 2019, p. 32).

Gerakan feminisme masa kolonial sering menggunakan kata emansipasi karena konteksnya pada perjuangan nasional (Melati, 2019, p. 34). Namun pada prinsipnya, “emansipasi” sama-sama memperjuangkan kesetaraan bagi para perempuan di wilayah Hindia Belanda yang menjadi Indonesia (Melati, 2019, p. 23).

Berkaitan dengan perjuangan memperoleh emansipasi, pada awal abad ke-20, di Indonesia muncul organisasi-organisasi perempuan. Tepatnya di Jakarta pada tahun 1912 didirikan organisasi yang bernama Putri Mardika. Lalu muncul juga organisasi serupa di berbagai daerah lainnya. Seperti Keutamaan Istri di Jawa Barat, Keradjinan Amai Setia di Sumatra Barat (1914), Pawijatan Wanito di Magelang (1915), Wanito Susilo di Pemalang (1918), dan masih banyak lagi. Namun pada saat itu, organisasi yang didirikan masih bersifat sosial. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan martabat perempuan dengan memberikan pendidikan di bidang rumah tangga, seperti menjahit, merawat dan mendidik anak (De-Stuers, 2008, pp. 84–87).

Pada tahun 1930-an, gerakan feminisme mulai memasuki area politik. Sebagai contoh Gerakan Istri Sedar dan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang semakin memasuki isu-isu politik khas sosialisme, seperti kondisi buruh dan perdagangan perempuan. Organisasi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang mengambil sikap politiknya pada pembebasan Irian Barat, membangun koperasi, hingga menjadi perwakilan dalam Konferensi Wanita Asia-Afrika. Sayangnya, ada campur tangan Soekarno yang memanfaatkan untuk kepentingan politik (Melati, 2019, p. 35).

Seiring berjalannya waktu dan Indonesia mulai terbentuk menjadi sebuah bangsa, pada tahun 1940-an muncul Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dengan orientasi yang lebih politis dan terasosiasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerwani muncul akibat iming-iming Soekarno mengenai kemerdekaan dan mendua dalam pergerakan feminisme. Di satu sisi Soekarno mendukung perempuan untuk berorganisasi dan merdeka, di sisi lain ia juga mengkritik gerakan feminisme yang semakin progresif (Melati, 2019, p. 35).

Ketika memasuki era Orde Baru, gerakan feminisme disebut ibuisme karena gerakan feminisme dipaksa mati dan perempuan dirumahkan. Ideologi ibuisme disebarkan pada Hari Ibu 22 Desember menjadi *mother's day* dan Hari Kartini menjadi hari beban ganda bagi perempuan. Kata-kata “ingat kodrat” dipopulerkan pada hari raya berbasis gender tersebut (Melati, 2019, p. 36). Menurut Nunuk P. Murniati, salah satu tokoh feminisme masa Orde Baru, gerakan feminisme terbagi ke dalam dua golongan. Golongan pertama pada 1966-1980 dan golongan kedua pada 1980-1998.

Pada golongan pertama, gerakan feminisme mengalami masa suram karena Soeharto berhasil melumpuhkan Kowani dalam Kongres Luar Biasa Kowani yang diselenggarakan pada tahun 1966 sehingga federasi itu mau mendukung pemerintahannya. Kowani ditunjuk untuk menjadi organisasi naungan bagi semua organisasi perempuan masa Orde Baru. Dari organisasi profesional, sosial, keagamaan, hingga fungsional. Dengan demikian Kowani berhenti sebagai alat perjuangan independen kaum perempuan, dan memilih dirinya dicetak mengikuti budaya “ikut suami” yang merupakan salah satu ciri Orde Baru. (Suryakusuma, 2011, p. 17).

Semua gerakan feminisme diwajibkan masuk ke dalam Kowani, semua perempuan desa diwajibkan mengikuti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK adalah satu-satunya saluran pemerintah di tingkat masyarakat kelas bawah baik di kota maupun desa untuk melaksanakan program-program bagi kaum perempuan. Baik di bidang sosial, politik, budaya, ideologi, dan ekonomi. Walaupun PKK memiliki kaitan dengan perempuan, sasaran terakhirnya adalah keluarga karena keluarga adalah pendukung pembentukan masyarakat dan keutuhan negara. Semua istri pegawai negeri diwajibkan mengikuti Dharma Wanita, semua istri anggota militer diwajibkan mengikuti Dharma Pertiwi (Suryakusuma, 2011, p. 27). Ditambah didirikannya Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita (UPW) pada tahun 1978 semata-mata untuk mengontrol populasi penduduk dan untuk mempertahankan ide mendasar tentang perempuan (Melati, 2019, p. 36).

Hingga pada periode 1980-1998, gerakan feminisme Indonesia mengalami perpecahan. Ada gerakan yang sejalan dengan pemerintahan dan ada yang melawan pemerintahan atau gerakan feminisme dependen dan gerakan feminisme independen. Adanya gerakan feminisme dependen inilah yang membuat para aktivis feminisme membuat terobosan baru berupa gerakan feminisme independen yang tidak ingin dikooptasi oleh pemerintah. Mereka beranggapan bahwa gerakan feminisme dependen adalah sebuah alat agar pemerintah Orde Baru mampu melegitimasi kekuasaannya dengan disertai pembentukan politik gender Orde Baru.

Yang sejalan dengan pemerintahan Soeharto adalah Kowani sedangkan yang melawan adalah ditandai dengan bermunculan yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan, atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang advokasi dan informasi mengenai masalah perempuan dan yang menjalani *kucing-kucingan* karena terbentur dengan kebijakan pemerintah yang ada. Meskipun begitu, gerakan feminisme independen tetap tumbuh di berbagai daerah dan nasional. Gerakan feminisme gelombang ini menjadikan rezim Orde Baru dan militerisme sebagai musuh bersama. Tujuan perjuangannya yaitu melawan patriarki, melawan rezim Orde Baru yang otoriter, dan memperjuangkan hak serta kesejahteraan perempuan.

Dimulai dari berdirinya Yayasan Annisa Swasti di Yogyakarta (1982) yang bertujuan untuk memperkuat hak-hak buruh perempuan dan perempuan yang bekerja di industri batik sebagai penjual di toko-toko. Diikuti dengan yang lainnya seperti Kalyanamitra di Jakarta (1985) yang sangat peduli pada

masalah-masalah yang dihadapi buruh dengan memberikan informasi mengenai hak-hak buruh, organisasi ini awalnya sudah sangat beripihak kepada buruh, nelayan, petani, dan pekerja sektor informal (Aripurnami, 2013, p. 25). Kemunculan gerakan feminisme pada awal tahun 1980-an, menginspirasi gerakan feminisme lain dan membuat kemunculannya semakin meningkat.

Pada tahun 1997, muncul sebuah organisasi yang bernama Suara Ibu Peduli. Organisasi ini berawal dari pertemuan diskusi yang dilakukan di Kantor Yayasan Jurnal Perempuan oleh para aktivis untuk melakukan demonstrasi guna menjatuhkan rezim Soeharto. Memilih isu susu bayi dinilai karena bisa menarik publik karena masalah itu dirasakan oleh semua orang. Susu bayi erat kaitannya dengan perempuan sebagai ibu. Dan Bundaran Hotel Indonesia dipilih sebagai tempat untuk berdemonstrasi karena tempatnya yang strategis dilalui oleh para pekerja dari kelas manapun.

Pada aksi demonstrasi dengan kamuflase pelabelan ibu-ibu menggunakan nama SIP, dengan kegiatan menyanyikan lagu, membagikan bunga, dan membaca puisi berlangsung begitu cepat dan berakhir dengan penangkapan beberapa orang aktivis seperti Gadis Arivia, Karlina Supelli, dan Wilasih Nophiana. Pada pembacaan pledoi dalam sidang, Gadis Arivia jelas mengindikasikan bahwa SIP adalah sebuah gerakan feminis dengan ide-ide feminis, meskipun pernyataan pembelaan itu tidak menyebutkan kata feminisme dan mengindikasikan bahwa kata “ibu” hanyalah sebuah strategi mengingat Indonesia dikuasai oleh kediktatoran.

Kasus SIP memberikan dampak yang luar biasa. Media massa bereaksi dengan membeli pelabelan “ibu-ibu”, dan menggambarkan aksi tersebut sebagai aksi “ibu-ibu” yang tidak memiliki kepentingan apa-apa. Namun anggapan yang diangkat oleh media masa saat itu tidak tepat karena aksi demonstrasi yang terjadi sepenuhnya dilakukan oleh aktivis feminis.

Pada saat bersamaan, kantor Jurnal Perempuan menjadi tempat pusat pengorganisasian nasi bungkus dan dana untuk mendukung demonstrasi gerakan mahasiswa pada Mei 1998. Dana tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti biaya transportasi, kaos bertuliskan “Reformasi Total”, dan penerbitan buletin propaganda mahasiswa “Bergerak”. Pada akhirnya Presiden Soeharto yang telah kehilangan legitimasi dan dukungan, menyatakan mundur dari jabatan pada tanggal 21 Mei 1998 (Arivia & Subono, 2018, p. 16). Reformasi yang dituntut oleh gerakan feminisme bukan hanya menggulingkan Presiden Soeharto, tetapi juga mengganti sistem yang berpihak pada perempuan

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti **Gelombang Kedua Gerakan Feminisme Indonesia Masa Orde Baru 1982-1998**. Tema penelitian tentang gerakan feminisme di Indonesia, telah merujuk pada satu permasalahan yang ingin diketahui, yaitu dinamika kehidupan gerakan feminisme ini, khususnya strategi dan tantangan yang dihadapi serta pengaruh gerakan tersebut terhadap turunnya Soeharto dari kursi jabatannya.

Sebagai bahan pembanding penelitian relevan dan sesuai dengan tema penelitian ini, penulis membandingkannya dengan skripsi milik Nur Aini Ramadhani mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya dan periode. Skripsi milik Nur Aini Ramadhani membahas perubahan peran perempuan dari ranah domestik ke publik dan mengambil periode dari Orde Baru hingga Reformasi, sedangkan milik penulis terfokus kepada dinamika gerakan-gerakan feminisme dan periode penelitiannya hanya sekitar Orde Baru saja.

Penulis juga membandingkan dengan jurnal yang berjudul “*Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang*” karya Sri Hayati Djoeffan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian milik Sri Hayati Djoeffan membahas Gerakan Feminisme secara menyeluruh dari setiap periode, sedangkan milik penulis hanya pada masa Orde Baru gelombang kedua sehingga penjelasannya pun lebih terperinci.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Batasan temporal pada penelitian ini adalah pada gelombang kedua gerakan feminisme masa Orde Baru, tepatnya dimulai pada tahun 1982 dimana pada tahun ini Yayasan Annisa Swasti berdiri di Yogyakarta. Tahun ini merupakan titik permulaan bangkitnya gerakan feminisme pada

masa Orde Baru, setelah pada gelombang pertama yaitu 1966-1980 gerakan feminisme dibatasi. Perempuan dirumahkan dan dikenal dengan istilah Ibuisme.

Sedangkan batasan akhir penelitian ini adalah ketika berakhirnya kekuasaan Orde Baru, tepatnya 1998. Diawali dengan krisis ekonomi yang berimbas kepada krisis politik. Para aktivis feminis beramai-ramai melakukan kampanye untuk menurunkan Soeharto dari kursi jabatannya. Seolah gerakan feminisme mendapat angin segar untuk kembali menghidupkan perjuangannya yang sebelumnya pernah meredup.

Dan batasan spasial pada penelitian ini lebih difokuskan dalam skala nasional yaitu Negara Indonesia. Karena pada periode ini, 1982-1998, gerakan feminisme di Indonesia mengalami masa bersiap untuk menuju reformasi yang diinginkan dengan bermunculan kembali yayasan atau organisasi independen yang membela hak-hak perempuan, setelah pada periode sebelumnya, 1966-1980, gerakan feminisme mengalami kemunduran akibat dari kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis merumuskannya sebagai berikut:

- a. Apa yang melatarbelakangi munculnya gelombang kedua gerakan feminisme Indonesia pada masa Orde Baru 1982-1998?

- b. Apa pengaruh gerakan feminisme tersebut terhadap turunya Soeharto dari kursi jabatannya?
- c. Apa saja strategi dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminisme tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

- a. Menguraikan latar belakang munculnya gelombang kedua gerakan feminisme Indonesia pada masa Orde Baru 1982-1998
- b. Menguraikan strategi dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminisme tersebut.
- c. Menjelaskan pengaruh gerakan feminisme tersebut terhadap turunya Soeharto dari kursi jabatannya.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini merupakan sebagai studi kepustakaan, baik dari Universitas Negeri Jakarta, maupun penulis lainnya yang ingin melakukan penelitian tentang gerakan feminisme Indonesia. Juga dapat menjadi pelengkap sejarah nasional Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru.

b. Kegunaan Praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan perkuliahan khususnya di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta sebagai kajian sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Selain itu untuk menambah wawasan mengenai sejarah nasional Indonesia bagi pemerintah dan masyarakat.

D. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode Penelitian

Karena sejarah disebut sebagai ilmu, maka sudah sepantasnya memerlukan metode dan metodologi. Metode sejarah atau metode penelitian sejarah adalah suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk meraih kebenaran dalam sejarah (Wasino, 2018, p. 11).

Penelitian ini membahas tentang Gerakan Feminisme Indonesia Gelombang Kedua Masa Orde Baru 1982-1998. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode deskriptif naratif (Kartodirdjo, 1993, p. 9). Metode penulisan deskriptif naratif adalah penulisan sejarah yang menguraikan kejadian sebagai proses, yang memuat uraian naratif atau cerita yang mengungkapkan bagaimana peristiwa itu terjadi, dilengkapi dengan fakta-fakta sejarah tentang “apa”, “siapa”, “kapan”, dan “di mana”. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Louis Gottschalk bahwa penelitian sejarah meliputi tahap heuristik atau pengumpulan sumber,

kritik, interpretasi, dan penulisan atau historiografi (Gottschalk, 2008, p. 18). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Heuristik

Heuristik adalah langkah permulaan. Tahap ini disebut juga tahap pengumpulan data, dimana penulis mencari sumber-sumber terkait untuk mendapat data dari materi sejarah. Sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 2013, p. 73).

Menurut bentuknya, sumber dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis atau dokumen dan artefak (Kuntowijoyo, 2013, p. 73). Sedangkan menurut urutan penyampaiannya, sumber dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata, sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh bukan saksi mata (Kuntowijoyo, 2013, p. 75). Dalam sumber tertulis, penulis menggunakan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam sumber primer dan sekunder, penulis melakukan wawancara dengan saksi mata dan bukan saksi mata.

b. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandangan nilai kenyataan (kebenarannya) (Wasino, 2018, p. 18). Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, penulis melakukan kritik pada data yang telah terkumpul dan melakukan

pengkajian terhadap sumber-sumber. Kritik dilakukan secara intern maupun ekstern. Kritik secara intern bertujuan untuk menguji kredibilitas sumber, dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain. Kritik intern yang dilakukan penulis salah satunya adalah membandingkan isi buku.

Buku yang penulis bandingkan adalah buku *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia: Analisis terhadap Para Aktor, Debat, dan Strategi* karya Gadis Arivia dan Nur Iman Subono dan buku *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru* karya Julia Suryakusuma. Kedua buku ini menjelaskan gerakan feminisme masa Orde Baru namun dalam periode yang berbeda. Pada buku yang pertama, membahas gerakan feminisme Orde Baru gelombang kedua, dimulai dari berdirinya Yayasan Annisa Swasti di Yogyakarta hingga proses turunnya Soeharto yang di dalamnya ada andil dari organisasi Suara Ibu Peduli. Dan pada buku kedua membahas gerakan feminisme Orde Baru gelombang pertama dimana pada masa ini gerakan feminisme mengalami keredupan dengan dibentuknya organisasi Dharma Wanita dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Perempuan). Maka dari itu penulis lebih banyak mendapat sumber dari buku pertama dibanding buku kedua karena periode penulis berada di masa Orde Baru gelombang kedua.

Sedangkan kritik secara ekstern untuk menguji otentisitas dalam penelitian dilakukan dengan cara mencari data mengenai kapan, di mana,

siapa, dari bahan apa sumber itu dibuat dan apakah sumber tersebut dalam bentuk asli.

c. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektivitas. Penafsiran itu sebageian benar, tetapi sebagian salah (Kuntowijoyo, 2013, p. 78). Proses interpretasi untuk analisis atau menguraikan dan sintesis atau menyatukan fakta-fakta sejarah. Hal ini dilakukan untuk mengaitkan fakta sejarah yang tampaknya terlepas antara satu sama lain. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data untuk menyikapi peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang bersamaan.

d. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan rekontruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu (Gottschalk, 2008, p. 39). Penelitian sejarah hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak fase awal perencanaan hingga fase penarikan kesimpulan. Pada tahap ini penulis merangkai data-data yang sudah didapat dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Fakta-fakta yang ada disusun dan ditulis dengan menyatakan pendapat yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sumber Penelitian

Dalam bagian bahan sumber untuk penelitian ini, sumber yang penulis gunakan berupa sumber primer dan skunder. Sumber primer didapatkan dari wawancara dengan saksi sejarah maupun tokoh terkait seperti Nunuk P. Murniati sebagai seorang teolog Kristiani sekaligus pendiri Solidaritas Perempuan dan Kelompok Perempuan Sadar, Sita Aripurnami sebagai salah satu pendiri yayasan Kalyanamitra. Selain itu sumber sezaman seperti arsip Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Majalah dari Editor “Persaingan Wanita Karier: Bersainglah Non!”

Selain sumber primer, penulis juga menggunakan sumber sekunder yang didapatkan dari literatur berupa beberapa buku yang berkaitan dengan gerakan feminisme Indonesia gelombang kedua masa Orde Baru seperti buku Seratus Tahun Feminisme di Indonesia karya Gadis Arivia dan Nur Iman Subono. Buku Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru karya Julia Suryakusuma. Buku Membicarakan Feminisme karya Nadya Karima Melati. Buku Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian karya Cora Vreede-De Stuers. Buku Merawat Memori Memupuk Kebangsaan: Komitmen Pada Cita-Cita Kongres Perempuan Indonesia karya Brigida Intan Printina. Buku Rekam Jejak Perempuan Indonesia karya ANRI. Buku Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru karya Yanti Muchtar.

E. Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian “Gerakan Feminisme Indonesia Gelombang Kedua Masa Orde Baru (1982-1998)” agar mudah dipahami dan dapat diperoleh gambaran dalam pemahaman penelitian ini, maka penulis menyusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu:

Bab I, mengemukakan secara terperinci mengenai dasar pemikiran yang menjadi alasan penulis sehingga mengkajinya sebagai topik penelitian skripsi. Dibahas juga mengenai pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan bahan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab II, membahas kehidupan gerakan feminisme di Indonesia dari masa kolonial, masa pendudukan Jepang, masa Orde Lama, dan masa Orde Baru periode 1966-1980.

Bab III, membahas mengenai dinamika kehidupan gelombang kedua gerakan feminisme Indonesia masa Orde Baru. Di dalamnya terdapat keadaan ekonomi, politik, dan sosial masa Orde Baru, latar belakang munculnya gelombang kedua gerakan feminisme Indonesia (1982-1998), perkembangan gerakan feminisme periode tersebut, strategi dan tantangan yang dihadapi gelombang kedua gerakan feminisme periode ini, organisasi gerakan feminisme, tokoh feminis Orde Baru periode 1982-1998.

Bab IV, yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab II dan III. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan dalam Bab I.